

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Pangerang Moenta dan Pradana Anugrah, 2017, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada, Makassar.
- Ani Sri Rahayu, 2017, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Malang.
- Cekli Setya Pratiwi Dkk, 2016, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, LelIP, Jakarta.
- Dahlan Tahub, 2000, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi, Liberty*, Yogyakarta.
- Dian Bakti Setiawan, 2011, *Pemberhentian Kepala Daerah: Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fariied Ali, 2012, *Hukum Tata Pemerintahan Heteronom dan Otonom*, Refika Aditama, Bandung.
- Hanif Nurcholis, 2007, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta.
- Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Irawan Soejito, 1990, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta.
- J. Kaloh, 2009, *Kepemimpinan Kepala Daerah: Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jhony Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang.
- Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Muhammad Tahir Azhary, 1992, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam*,

Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Bulan Bintang, Jakarta.

Mukhtie Fajar, 2001, *Reformasi Konstitusi pada Masa Transisi Paradigmatik*, Intrans, Malang.

Ni'matul Huda dan Imam Nasef, 2017, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Refoemasi*, Kencana, Jakarta.

Ni'matul Huda, 2019, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Pers, Depok.

Nur Basuki Winarno, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.

Nurmayani, 2009, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung, Lampung.

Nurul Qomar, 2013, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peter Mahmud, 2005, *penelitian hukum edisi revisi*, Kencana Prenada Media, Jakarta.

Riant Nugroho, 2008, *Public Policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Risk Managament dalam Kebijakan Publik Kebijakan Sebagai Fifth Estate, Metode Penelitian Kebijakan*, Elex Media Komputindo, Jakarta.

Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Kota Depok.

Sayuti, 2011, *Konsep Rechtsstaat dalam Negara Hukum*, Nalar Fiqh, Jambi.

Sinyo Harry Sarundajang, 1999, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.

Karya Ilmiah

Dewi Triwahyuni & Fuqoha, "Efektivitas Jabatan Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan", *Jurnal Administrasi Negara*, Volume No. 2, Januari-April, hlm. 35

Fabian Riza Kurnia dan Rizari, 2019, "Tinjauan Yuridis Kewenangan Pejabat Sementara (PJS) Kepala Daerah Pada Masa Cuti Kampanye Kepala Daerah Petahana", *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, Volume 11 Nomor 2, hlm. 85

Nandang Alamsyah Deliarnoor, 2015, "Problematika Pelaksana Tugas (Plt) Dalam Masa Transisi Pemerintahan (Pra dan Pasca Pilkada Serentak)", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 1 No. 2, Oktober, hlm. 324

Rivani Alfinita S., 2012, *Analisis "Job Description" Pada Subag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan*, Skripsi, Universitas Hasanuddin.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang

Pemilihan Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian
Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelantikan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 tahun 2010
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K .26-30 IV .100 -2
Tanggal : 19 Oktober 2015

Internet

Adam Prireza, 2020, Begini Kronologi Operasi Tangkap Tangan Wali Kota
Medan, (<https://nasional.tempo.co/read/1260749/begini-kronologi-operasi-tangkap-tangan-wali-kota-medan>, Diakses
Pada 25 Februari 2020 Pukul 13:06 Wita)

Saldy Irawan, 2020, “Ini Kebijakan Yusran Jusuf Selama 44 Hari Pimpin
Makassar” (<https://makassar.tribunnews.com/2020/06/25/ini-kebijakan-yusran-jusuf-selama-44-hari-pimpin-makassar>),
diakses pada tanggal 23 Juni 2023.

Wicaksana Dramanda, 2014, “Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintahan”
(<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pejabat-negara-dan-pejabat-pemerintahan-lt52f38f89a7720>, Diakses pada 25
Februari 2022 Pukul 19:00 Wita)